

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini suatu proses kebijakan secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan, salah satunya adalah implementasi kebijakan *Smart City*.

Pembangunan dan pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*) sebuah konsep Kota Cerdas yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Konsep kota cerdas menjadi salah satu pendekatan yang *fashionable* dalam pengembangan kota. ((Axelsson & Granath, 2018).

Konsep dan implementasinya pun makin berkembang. Kini *Smart City* sudah diterapkan di banyak negara termasuk di Indonesia. Implementasi *Smart City* juga terjadi di sejumlah kota dan daerah di Indonesia dalam menerapkan *Smart City* di berbagai bidang kehidupan, diharapkan mampu mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di perkotaan dan perdesaan. (Lubis & Safii, 2018).

Smart city adalah sebuah impian dari semua kota-kota besar di seluruh dunia. Perencanaan *Smart City* adalah agenda global sebagai respon konseptual dan praktis terhadap berbagai krisis perkotaan di dunia yang semakin mengawatirkan, untuk mengembalikan hubungan antara manusia, ruang binaan dan ruang alami yang lebih harmonis, sehingga tidak saling menyakiti. *Smart city* adalah sebuah konsep Kota Cerdas yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya (Alkaf & Sutrisno, 2019)

Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru untuk menjadi kota yang cerdas. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi dengan 6 (enam) spesifikasi *Master Plan Smart City* yaitu *Smart Government* (pemerintahan pintar), *Smart Economy* (Ekonomi pintar), *Smart Mobility* (Mobilitas pintar), *Smart People* (Masyarakat pintar), dan *Smart Living* (Lingkungan pintar) serta *Smart Live* (Hidup pintar). Konsep ini dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat.

Smart city memiliki beberapa definisi, salah satu dari definisi tersebut yaitu menurut Leonidas G. Anthopoulos. Menurut Leonidas G. Anthopoulos (2017:8), *smart city* merupakan sebuah pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi, serta inovasi oleh kota, sebagai sarana untuk mendukung pembangunan dalam ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan untuk mengatasi beberapa tantangan yang berhubungan dengan enam

dimensi, yaitu masyarakat, ekonomi, pemerintah, mobilitas, lingkungan, serta mata pencaharian.

Pemerintah Daerah melalui inovasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi sebagaimana dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang salah satunya menumbuhkan perekonomian dan kewirausahaan daerah melalui *Smart Economy*.

Isu prioritas dalam dokumen RPJP Kabupaten saat ini dan pada masa yang akan datang adalah pengembangan *Smart Economy*. Isu ini menjadi prioritas pertama di samping pengembangan ekonomi kreatif, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan daya serap tenaga kerja di sektor unggulan, dan penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ketahanan pangan dan gizi, dan penguatan budaya cinta produk dalam negeri.

Pengembangan *Smart Economy* adalah wujud dari tuntutan perubahan zaman sekarang. Zaman di mana kegiatan ekonomi yang dapat memenangkan persaingan adalah ekonomi yang bercirikan empat indikator seperti *simpler* (lebih mudah), *cheaper* (lebih murah), *accessible* (lebih terjangkau), dan *faster* (lebih cepat). Empat indikator tersebut dapat dicapai dengan penguasaan terhadap teknologi informasi dan juga teknologi internet.

Smart economy konsep kabupaten yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi

berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat dan ada tujuh indikator untuk mencapai *smart economy*. Tujuh indikator dan fasilitas pendukung yang dapat diberikan untuk mendukung kabupaten mencapai *Smart Economy* adalah semangat berinovasi dan berkreasi, kewirausahaan, citra dan siri khas kota, produktivitas, pasar tenaga kerja yang fleksibel, konektivitas dengan dunia internasional serta kemampuan untuk bertransformasi.

Smart economy atau ekonomi pintar (inovasi dan persaingan) ditandai dengan semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. Perwujudan dari *smart economy* adalah apabila kabupaten mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk peningkatan kegiatan ekonominya.

Menurut Lubis & Safii (2018) *Smart Economy* adalah ekonomi yang fleksibel dan memiliki kemampuan untuk berkompetisi (keterbukaan), membuat nilai tambah yang tinggi, berdasarkan pengetahuan, inovasi kewirausahaan (kreativitas), dan tanggung jawab sosial serta pertumbuhan hijau (tanggung jawab), serta *Smart Economy* membedakan kemampuan untuk melawan tantangan ekonomi, menciptakan pekerjaan, mendirikan bisnis baru, dan meningkatkan ketertarikan serta kompetitif regional.

Smart economy adalah salah satu komponen dari *smart city*. Konsep *smart city* adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat pada era digital seperti saat ini.

Konsep *smart economy* di dalam kebijakan Kabupaten Sumenep dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil, dan Profesional” Kabupaten Sumenep telah berupaya maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui menjadikan Sumenep sebagai Kota Batik, Kota Ukir, Kota Sumekar, Kota Keris dan saat ini Kota Cerdas atau *smart city*. Sebagai wujud komitmen, arah pembangunan kedepan yaitu 2019-2028. Dengan visi ini, pemerintah Kabupaten Sumenep bersama-sama pemangku kepentingan (swasta, akademisi, tokoh agama, asosiasi, dan masyarakat) akan dipandu dalam mengelola berbagai persoalan daerah, meningkatkan tata kelola pelayanan publik, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Sumenep.

Sasaran *smart economy* Kabupaten Sumenep adalah meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui integrasi tata kelola industri primer, sekunder, dan tersier serta memaksimalkan peran ekonomi digital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Globalisasi *smart economy* sendiri dapat terjadi karena adanya pertukaran baik dari segi ekonomi, pembangunan, sosial, maupun budaya serta globalisasi juga dapat memengaruhi perekonomian suatu negara, terutama dalam bidang jual beli, sehingga pengembangan masyarakat Kabupaten Sumenep dapat mandiri dalam berwirausaha mandiri guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Salah yang telah tercipta 1000 entrepreneur muda.

Saat ini, pemerintah Kabupaten Sumenep memberi perhatian serius terhadap pengembangan usaha kerakyatan yang makin mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi disparitas pendapatan antar penduduk wilayah kepulauan dan daratan. Keberadaan teknologi digital (TIK) perlu dimanfaatkan oleh Kabupaten Sumenep untuk membantu meningkatkan daya saing ekonomi melalui berbagai *platform* ekonomi digital yang terintegrasi.

Sebagaimana konsep *smart city* yang dilakukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep dengan berbagai program yang direncanakan yaitu Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Program Penelitian dan Pengembangan yang kesemua ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan kemandirian usaha serta untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut adaptasi yang cepat. (DPMPT Satu Pintu dan Naker Kab. Sumenep, 2022).

Adanya ekonomi cerdas sangat baik bagi masyarakat Kabupaten Sumenep, namun program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, masih belum terlihat secara jelas dihadapan publik dan tidak menunjukkan adanya kabupaten cerdas seperti peningkatan ketrampilan dengan cara dilatih dan dididik masih tidak nyata serta program kesempatan kerja sebagaimana yang ada di *master plan smart economy* masih belum terlihat, walaupun ada sebagian masyarakat yang telah mendapatkan kerja.

Pada sisi lainnya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep, hanya memberikan pelatihan tanpa arah sehingga tindak lanjut yang dilatih kurang bisa dimanfaatkan secara nyata bagi yang dilatih.

Mencapai tujuan tersebut yang sejahtera dilakukan pendekatan Melalui Optimalisasi Pemanfaatan TIK. Untuk akselerasi mencapai visi *smart city* tersebut diperlukan pemanfaatan atau sentuhan teknologi informasi dan komunikasi sebagai *enabler*.

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Implementasi Program *Smart Economy* Dalam Mewujudkan Kabupaten Sumenep *Smart City*” (Studi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah Bagaimanakah Implementasi Program *Smart Economy* Dalam Mewujudkan Kabupaten Sumenep *Smart City* ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini, adalah : Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Implementasi Program *Smart Economy* Dalam Mewujudkan Kabupaten Sumenep *Smart City*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Konsep Kebijakan *Smart City*.

2. Manfaat Akademis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi Implementasi Kebijakan *Smart City* Dalam Peningkatan ekonomi kerakyatan, agar mengetahui kemampuan Smart City dalam membangun kota.

3. Manfaat Praktis

Adanya skripsi ini, diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pembangunan kabupaten, menuju kabupaten yang lebih berkembang.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup enam bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada bab ini terdiri dari penelitian sebelumnya (*state of the art*) penelitian sebelumnya dengan penelitian setelahnya, landasan teori yang terdiri dari dasar-dasar teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari fokus penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, jenis, dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data pada penelitian yang dilakukan

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dari *Smart Economy* dalam Menunjang *Smart City*

BAB VI PENUTUP

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.